

Ketua H. Abdillah Nashih Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H. Wakil Ketua H. Kayan, SH Wakil Ketua Warih Andono, SE

Pemkab Buka Seleksi Empat Jabatan Komisaris dan Direksi BUMD

Pendaftaran hingga 17 April

Seleksi terbuka. Dua BUMD tersebut yaitu Perusahaan Listrik Daerah (PLD) dan PT Aneka Usaha Sidoarjo. Pemula yang dilantik sebagai komisaris dan direksi operasional dan teknis di PLD Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo. Satu jabatan direksi juga dibuka di PT Aneka Usaha Sidoarjo.

Asisten II Setda Sidoarjo Bidang Perencanaan dan Penganggaran Bambang Nugroho mengatakan bahwa seluruh jabatan tersebut akan diisi oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman dan kemampuan di bidangnya.

Dia menjelaskan salah satu kompetensi di PLD Delta Artha adalah di bidang tenaga listrik. Untuk itu, pihaknya akan melakukan seleksi terbuka yang akan melibatkan tenaga profesional di bidang tenaga listrik.

JABATAN YANG DIPERLEBUTKAN

No	Nama Jabatan	Jumlah	Uang Gaji
1	Direksi Operasional	1	Rp 18.000.000
2	Direksi Teknis	1	Rp 18.000.000
3	Komisaris	4	Rp 18.000.000



Bahari Amig
Ketua DPRD Sidoarjo Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Ini jabatan strategis sehingga harus melalui seleksi. Bahari Amig Ketua DPRD Sidoarjo Bidang Perencanaan dan Penganggaran

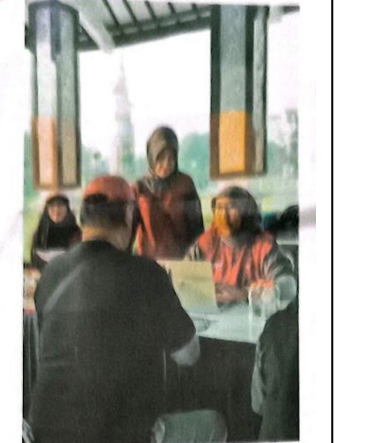
DLHK Ambil Alih Pengelolaan TPS3R Terungkulan

Data Tak Valid dan Retribusi Macet

SIDOARJO - Dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) mengambil alih pengelolaan TPS3R Desa Terungkulan, Krian. Upaya tersebut dilakukan karena DLHK menemukan adanya pengelolaan bermasalah dan menunggak retribusi Rp 26 juta. Kepala TPA Griyo Mulyo Hajid Arif Hidayat mengungkapkan, masyarakat sebenarnya sudah membayar iuran antara Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per bulan. Tapi, iuran tersebut tidak disetor ke pemerintah. "Pengelolaannya tidak berjalan baik," kata Hajid.

Dia menjelaskan, persoalan utama berasal dari kurangnya kelengkapan pengelolaan sampah di tingkat desa. Selama ini tidak ada kelompok swadaya masyarakat (KSM) maupun BUMDes yang secara resmi mengkoordinasikan operasional TPS3R. Masalah diperparah dengan data layanan yang tidak valid. DLHK menggunakan petugas khusus untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh.

Pj Kepala Desa Terungkulan Randi Wisnu Kusuma beryukur pengelolaan sampah di desanya mendapatkan perhatian. "Kami akan dikawal pembuatan KSM-nya agar pengelolaan sampah lebih baik," kata Randi. (ful/hen)



TERJUN LANGSUNG: Pelayan BPPD Sidoarjo terhadap masyarakat yang membayar pajak.

FASILITAS KESEHATAN



BANGUNAN BARU: RSUD poli kulit dan spesialis bedah saraf bakal dioperasikan di kawasan Gedung Dialisis RSUD Sibar

SIDOARJO - RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) berencana membuka poli kulit dan poli spesialis bedah saraf. Upaya tersebut dilakukan seiring kebutuhan layanan kesehatan terkait kedua penyakit tersebut. Direktur RSUD Sibar dr Abdillah Segaf Alhadad mengatakan, pembukaan layanan akan diikuti sejumlah program penataan. Layanan hemodialisis yang awalnya di lantai satu akan dipindah ke lantai dua. Sedangkan, lantai satu akan dimanfaatkan untuk layanan anjuran. Termasuk poli nyeri dan spesialis bedah saraf. Dia menyebut, keterbatasan ruang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan layanan di RSUD Sibar. Karena itu, penataan ulang dilakukan bersamaan dengan pembangunan fisik agar pemanfaatan ruang lebih optimal. Selain itu, nantinya lantai satu yang kosong juga akan digunakan untuk ruang rehabilitasi medis. (ful/hen)



Takziah ke Rumah Balita Tenggelam, Wabup Mimik Usulkan Pembangunan Pembatas Sungai

SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idlayana menyampaikan takziah kepada keluarga yang meninggal di Sungai Kalkidawi, Tanggulangin. Dalam kunjungannya kemarin (13/4), Mimik menyortir perlunya langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang. Ada sejumlah persoalan yang perlu dibahas bersama. Lingkungan permukaan yang berdekatan dengan aliran sungai memiliki risiko tinggi. Khususnya bagi anak-anak yang masih belum memahami bahaya. Karena itu, Mimik menilai pentingnya pengawasaan dan fasilitas pemangam di sekitar sungai. "Kami akan mimik OPD untuk perdeteksi pemangam dan runtuhin diberi pembatas," jelasnya.

Beri Dukungan Psikis

Mimik menambahkan, orang tua juga diminta pro-



BELUM TERTATA: DLHK bakal mengawasi petugas khusus untuk memperbaiki sistem pengelolaan TPS3R Desa Terungkulan, Krian.

Sering Melanggar, Satpol PP Tertibkan PKL di Jalan Majapahit

KOTA-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan patroli dan cipta kondisi guna menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan yang diawali sejak pagi tersebut melibatkan kekuatan 19 personel. Patroli menyorot sejumlah titik strategis di wilayah kota, di antaranya Alun-alun Sidoarjo, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Raya Candi, kawasan Gading Fajar, Taman

Bayar Pajak Sambil Olahraga BPPD Hadirkan Layanan PBB hingga Samsat Keliling

WARGA kini bisa membayar pajak tanpa harus mengorbankan waktu kerja. Cukup datang ke Car Free Day (CFD) Alun-alun Sidoarjo setiap Minggu pagi, berbagai layanan pajak sudah tersedia dalam satu lokasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Badan Pelayan Pajak Daerah (BPPD) menghadirkan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kawasan CFD.

Tak hanya itu, layanan juga diperluas melalui kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, yang menghadirkan mobil Samsat Keliling untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Noer Rachmawati, mengatakan bahwa layanan ini sengaja dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. "Layanan pembayaran pajak daerah sengaja kami hadirkan saat CFD Sidoarjo

Pasar Tradisional di Sidoarjo Sepi Pengunjung, Pembeli Pilih Belanja di Pasar Tumpah

Keberadaan pasar desa yang ada di kabupaten Sidoarjo, lebih menarik bagi pedagang yang selama ini berjualan di dalam pasar-pasar tradisional di Sidoarjo. Ali Kuyanto, Sidoarjo Merka akhirnya pindah tempat jualan, dari pasar tradisional ke pasar desa, karena dianggap lebih ramai pembeli. Pada hari libur seperti Hari Minggu di pasar ini pembeliannya membahad. Pedagang berjualan di pinggir jalan agar menuju Perumahan TAS 3 tersebut. Tertantunya ada sekelompok orang yang memungut retribusi kepada para pedagang yang berjualan. Namun, para pembeli dari pihak desa atau kelompok mana, mereka membeli, selain warga Perumahan TAS 3 juga warga desa yang berada di sekitar Perumahan 3 itu. Termasuk juga ada dari warga desa yang dekat dengan pasar



Pasar Desa Sawarotari, Kecamatan Gedangan, setiap hari ramai pengunjung dan pembeli.

Perajin Tahu dan Tempe Keluhkan Naiknya Harga Kedelai Impor

KOTA-Ura women Lehan, para perajin tahu dan tempe di Sidoarjo diledakkan pada tekanan baru. Harga kedelai impor yang meleset sudah bikin mereka keluh kesah. Bahkan, mereka khawatir terhadap kelangkaan sumber daya. Kemungkinan besar, tempe yang tidak benar, namun cukup banyak. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp 10.000 hingga Rp 10.500 per kilogram, kini harga kedelai impor menembus Rp 10.000 per kilogram. Di Desa Gedangan, Kecamatan Candi, lingkungan lain yang mengalami kenaikan harga kedelai impor adalah tempe. Harga kedelai impor

Bupati Sidoarjo Beri BPJS dan Kursi Roda untuk Warga Taman

Sidoarjo-JABATAN RANGSA Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat. Militer dari jember BPJS Kesehatan, seperti kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Bupati Sidoarjo Subandi saat menyantiaikan bantuan kesehatan kepada warga Kecamatan Taman. Bupati Subandi mengatakan, bantuan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang membutuhkan. "Kami akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti kursi roda bagi warga yang membutuhkan."

Pemkab Sidoarjo Maksimalkan Layanan Publik Lewat Car Free Day

Sidoarjo, Pajak Kota -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Badan Pelayan Pajak Daerah (BPPD) menghadirkan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kawasan CFD. Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Noer Rachmawati, mengatakan bahwa layanan ini sengaja dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. "Layanan pembayaran pajak daerah sengaja kami hadirkan saat CFD Sidoarjo





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Advertorial | **Headline** | Indeks | Pendidikan & Kesehatan | Politik & Pemerintahan

DPRD Sidoarjo Kawal Ketat Program Beasiswa 2026, Tekankan Akurasi Data dan Pemerataan Akses Pendidikan

oleh redaksi sidoarjo terkini · 13/04/2026 · 10

BAGIKAN



SIDOARJOTerkini – Program beasiswa yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026 dipastikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sektor pendidikan daerah. Kebijakan ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai bantuan sosial tahunan, melainkan telah ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperluas akses pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi secara lebih merata.

Komitmen kuat untuk memastikan program ini berjalan optimal datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, khususnya Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Lembaga legislatif tersebut menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar program beasiswa benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.



Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H. Bangun Winarso

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Bangun Winarso, menegaskan bahwa program beasiswa tahun 2026 merupakan bagian penting dari komitmen politik kepala daerah yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut, program ini merupakan salah satu janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang wajib diwujudkan secara konkret dan terukur.

"Program beasiswa ini adalah janji politik yang harus ditepati. Karena itu, implementasinya tidak boleh asal-asalan. Harus tepat sasaran, sesuai aturan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bangun.

Menurutnya, salah satu kunci utama keberhasilan program ini terletak pada kualitas data penerima manfaat. Ia menekankan bahwa data yang digunakan harus akurat, valid, dan telah melalui proses verifikasi yang ketat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku.

Bangun mengingatkan bahwa kesalahan dalam pendataan berpotensi besar menyebabkan program tidak efektif bahkan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat untuk bekerja secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.



"Verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara serius. Jangan sampai ada penerima yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terlewat," tegasnya.

Ia juga menambahkan, setiap OPD harus menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing serta memastikan proses seleksi penerima berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pendataan yang baik, lanjutnya, akan menjadi fondasi kuat dalam memastikan keberhasilan program.

BACA JUGA : [Pelapor Kasus Dugaan Tipu Gelap Jual Beli Kasur di Sidoarjo Sebut Bukan Perdata Tapi Penggelapan](#)

Lebih jauh, Bangun menilai bahwa dampak dari program beasiswa tidak hanya bisa dilihat dari jumlah penerima semata.

Menurutnya, keberhasilan program harus diukur melalui indikator pendidikan yang lebih luas, seperti meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta bertambahnya jumlah masyarakat usia produktif yang mampu mengakses pendidikan tinggi.

"Kalau program ini berjalan baik, maka indikator pendidikan kita akan ikut meningkat. Ini yang harus menjadi target bersama, bukan sekadar mengejar kuantitas penerima," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerataan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga menyangkut kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat.

"Akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya. Tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga soal kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan. Di sinilah peran beasiswa menjadi sangat penting," jelasnya.

Bangun mendorong agar pemerintah daerah terus memperluas jalur afirmasi bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program Beasiswa tahun 2026 yang digulirkan Pemkab Sidoarjo membuka program beasiswa pendidikan untuk 4.000 penerima, meliputi siswa SD, SMP, SMA/ sederajat, dan mahasiswa berprestasi atau kurang mampu. Beasiswa diperuntukkan bagi warga ber-KTP Sidoarjo serta terdaftar di DTKS/melampirkan SKTM (untuk kurang mampu) dan aktif kuliah/sekolah. Beasiswa menasar Anak Yatim (SD-SMA), Siswa berprestasi (Akademik & Non-Akademik), siswa Kurang Mampu dan bidang Keagamaan.



Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto, SH., MH., memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program beasiswa yang selama ini berjalan. Ia menilai masih terdapat kelemahan dalam mekanisme penyaluran, khususnya terkait validasi data penerima.

Menurut Tarkit, sistem pengajuan yang selama ini cenderung mengandalkan data daring dari siswa belum cukup mampu menjamin ketepatan sasaran. Ia menilai, perlu adanya langkah verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi riil calon penerima.

BACA JUGA : [Halal Bihalal MUI Sidoarjo Perkuat Sinergi Ulama dan Umaroh](#)

"Tidak cukup hanya mengandalkan data online. Harus ada pengecekan langsung ke lapangan agar kita benar-benar tahu kondisi ekonomi calon penerima," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa survei lapangan menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahan sasaran. Dengan melihat langsung kondisi keluarga calon penerima, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

"Tidak cukup hanya mengandalkan data online. Harus ada pengecekan langsung ke lapangan agar kita benar-benar tahu kondisi ekonomi calon penerima," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa survei lapangan menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahan sasaran. Dengan melihat langsung kondisi keluarga calon penerima, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Selain faktor ekonomi, Tarkit juga menilai bahwa aspek prestasi siswa perlu menjadi pertimbangan dalam pemberian beasiswa. Menurutnya, program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik.

"Prestasi juga harus diperhitungkan. Kita ingin program ini bisa mendorong semangat belajar sekaligus memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Tarkit mengusulkan agar nomenklatur "beasiswa" yang digunakan dalam program ini dikaji ulang. Ia menilai istilah tersebut kurang tepat jika melihat cakupan program yang tidak hanya menasar siswa berprestasi, tetapi juga masyarakat kurang mampu.

"Kalau melihat konsepnya, ini lebih tepat disebut bantuan pendidikan. Karena tidak semua penerima berbasis prestasi, tetapi juga berbasis kondisi ekonomi," jelasnya.

Ia berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, sehingga program bantuan pendidikan di Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem yang lebih baik, potensi penyalahgunaan data maupun ketidaktepatan sasaran dapat diminimalisir.

Tarkit juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses verifikasi data. Ia menyebut, keterlibatan pemerintah desa, pihak sekolah, hingga dinas terkait sangat diperlukan untuk memastikan keakuratan data penerima.

"Kolaborasi ini penting. Pemerintah desa tahu kondisi warganya, sekolah tahu kondisi siswanya. Kalau semua bersinergi, data yang dihasilkan akan lebih valid," tambahnya.



Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Wahyu Lumaksono
S.Pd.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo lainnya, Wahyu Lumaksono S.Pd. Ia menilai program beasiswa merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Wahyu, program ini memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat dari kalangan kurang mampu yang selama ini menghadapi kendala biaya.

BACA JUGA : [Babinsa Candi Hadiri Rakor Pilkades Kedungkendo, Cakades Sepakat Jaga Pilkades Damai](#)

"Program ini sangat penting untuk pemerataan pendidikan. Kita ingin semua anak di Sidoarjo punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas proses verifikasi data. Oleh karena itu, ia mendorong agar proses seleksi penerima dilakukan secara lebih selektif dan akurat.

"Data harus benar-benar valid. Jangan sampai program yang baik ini justru tidak tepat sasaran," tegasnya.

Wahyu turut mendorong agar jumlah penerima beasiswa dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan cakupan yang semakin luas, ia optimistis program ini akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sidoarjo.

"Kami berharap ke depan jumlah penerima semakin banyak. Dengan begitu, semakin banyak anak-anak yang bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi," imbuhnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa program beasiswa ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masa depan pendidikan Sidoarjo yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ia berharap tidak ada lagi anak-anak yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan biaya.

"Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kalau kita ingin Sidoarjo maju, maka kita harus serius membangun sektor pendidikan," pungkasnya.

Dengan komitmen kuat dari DPRD serta dukungan berbagai pihak, program beasiswa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi solusi strategis dalam menciptakan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, institusi pendidikan, serta masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program ini. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Jika seluruh mekanisme dapat berjalan sesuai harapan, maka program beasiswa ini tidak hanya akan meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.(ADV/cles)

BAGIKAN





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jawa Pos • METROPOLIS | SELASA 14 APRIL TAHUN 2026 | HALAMAN 18

Pemkab Buka Seleksi Empat Jabatan Komisaris dan Direksi BUMD

Pendaftaran hingga 17 April

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo membuka seleksi direksi dan komisaris pada dua badan usaha milik daerah (BUMD). Total ada empat jabatan yang saat ini harus diisi. Seleksi dilakukan

melalui mekanisme terbuka. Dua BUMD tersebut yakni Perumda BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo. Formasi yang dibuka meliputi dua komisaris dan satu direktur operasional dan bisnis di BPR Delta Artha. Satu jabatan direktur juga dibuka di PT Aneka Usaha Sidoarjo.

Asisten II Setda Sidoarjo Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig mengatakan bahwa seluruh jabatan tersebut dalam kondisi kosong. Pengisian dilakukan untuk menjaga kinerja perusahaan daerah. "Ini jabatan strategis sehingga harus melalui seleksi," katanya kemarin (13/4).

Dia menjelaskan salah satu komisaris di BPR Delta Artha berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara yang lainnya berasal dari profesional. Ketentuan tersebut mengacu pada posisi pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Kendati demikian, ASN yang mendaftar tetap harus mengikuti proses assessment.

Hindari Praktik Titipan

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sidoarjo Muhammad Nur menjelaskan jika seleksi saat ini masih dalam tahap pendaftaran yang dibuka hingga 17 April. "Masih belum ada pelamar yang masuk," ka-

tanya kemarin. Dia menyebut jika peserta kemungkinan masih menyiapkan persyaratan administrasi. Setelah pendaftaran nanti ditutup, panitia akan melakukan verifikasi berkas. Tahapan berikutnya meliputi pra-tes dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Peserta juga menjalani psi-

kotes, ujian tertulis, serta presentasi makalah.

Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan meminta proses seleksi berjalan transparan dan profesional. Dia mengingatkan agar tidak ada praktik titipan. "Seleksi harus dijalankan secara profesional," ungkapnya. (ful/hen)

JABATAN YANG DIPEREBUTKAN

- Dua komisaris BPR Delta Artha
- Direktur operasional dan bisnis BPR Delta Artha
- Direktur PT Aneka Usaha Sidoarjo

Sumber: Berbagai Informasi

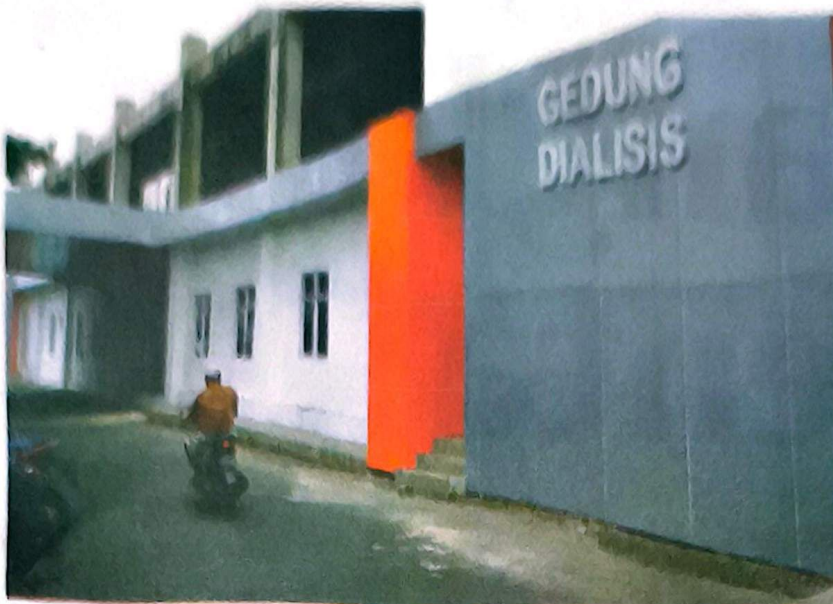


Ini jabatan strategis sehingga harus melalui seleksi."

Bahrul Amig
Asisten II Setda Sidoarjo
Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Jawa Pos

FASILITAS KESEHATAN



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BANGUNAN BARU: Layanan poli kulit dan spesialis bedah saraf bakal dioperasikan di kawasan Gedung Dialisis RSUD Sibar.

RSUD Sibar Buka Layanan Poli Kulit dan Bedah Saraf

SIDOARJO - RSUD Sidoarjo Barat (Sibar)

berencana membuka poli kulit dan poli spesialis bedah saraf. Upaya tersebut dilakukan seiring kebutuhan layanan kesehatan terkait kedua penyakit tersebut.

Direktur RSUD Sibar dr Abdillah Segaf Alhadad mengatakan, pembukaan layanan anyar diikuti sejumlah program penataan. Pelayanan hemodialisis yang awalnya di lantai satu akan dipindah ke lantai dua. Sedangkan, lantai satu akan dimanfaatkan untuk layanan anyar. Termasuk poli nyeri dan spesialis bedah saraf.

Dia menyebut, keterbatasan ruang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan layanan di RSUD Sibar. Karena itu, penataan ulang dilakukan bersamaan dengan pembangunan fisik agar pemanfaatan ruang lebih optimal. Selain itu, nantinya lantai satu yang kosong juga akan digunakan untuk ruang rehabilitasi medis. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

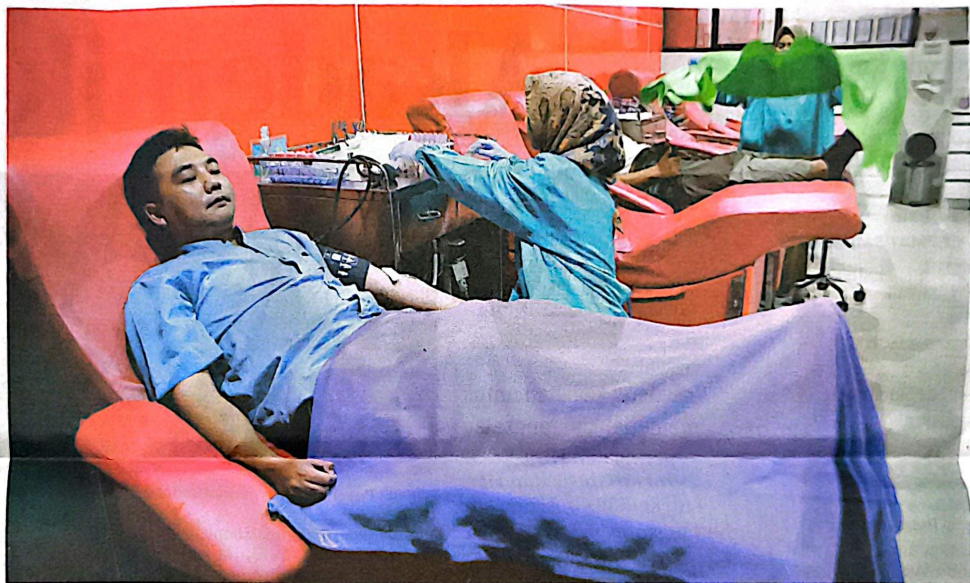
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Orang Tua Donor 25 Kali, Anak Dapat Rekomendasi Masuk SMP Jalur Prestasi

SIDOARJO - Ada penghargaan untuk pendonor darah yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 25 kali di UTD PMI Sidoarjo. Mereka bakal mendapat rekomendasi khusus yang bisa dipakai untuk memasukan anaknya ke SMP lewat jalur prestasi.

Humas UTD PMI Sidoarjo Arifah mengatakan, pihaknya mulai membuka pengurusan berkas bagi pendonor yang memenuhi syarat. "Kami mulai hari ini (kemarin, Red) membuka pengurusan berkas bagi yang sudah 25 kali donor untuk mendaftarkan anaknya," ujarnya kemarin (13/4).

Ia menjelaskan, bukti donor ditunjukkan melalui piagam yang diterbitkan oleh UTD PMI Sidoarjo. Dokumen tersebut cukup difotokopi dan diserahkan kepada petugas untuk selanjutnya diterbitkan surat rekomendasi sebagai lampiran wajib saat mendaftar Seleksi Penerimaan



HANYA DI UTD PMI: Petugas melayani salah satu pendonor darah kemarin (13/4). Orang tua yang sudah 25 kali donor darah berhak mendapat rekomendasi anak masuk SMP jalur prestasi.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Murid Baru (SPMB). "Tahun lalu ada 28 yang mengajukan ke kami," katanya.

Berasal dari Satu Orang

Arifah menegaskan, syarat

tersebut hanya berlaku bagi pendonor yang melakukan donor sebanyak 25 kali di UTD PMI Sidoarjo. Selain itu, jumlah donor tidak bisa digabung dalam satu kartu keluarga (KK) dan

harus berasal dari satu orang saja.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Netti Lastiningsih membenarkan bahwa pro-

gram tersebut masuk dalam jalur prestasi pada SPMB SMP. Jalur ini memberikan ruang bagi penghargaan nonakademik, termasuk kontribusi sosial seperti donor darah. (eza/hen)

Jawa Pos



PEMKAB SIDOARJO

SAMPAIKAN BELASUNGKAWA: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana (dua dari kanan) berdialog dengan keluarga balita yang tenggelam di Sungai Kalidawir, Tanggulangin.

Takziah ke Rumah Balita Tenggelam, Wabup Mimik Usulkan Pembangunan Pembatas Sungai

SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyambangi rumah duka Gibran Septian, 2, korban tenggelam di Sungai Kalidawir, Tanggulangin. Dalam kunjungannya kemarin (13/4), Mimik menyoroti perlunya langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Ada sejumlah persoalan yang perlu dibahas bersama. Lingkungan permukiman yang berdekatan dengan aliran sungai memiliki risiko

tinggi. Khususnya bagi anak-anak yang masih belum memahami bahaya.

Karena itu, Mimik menilai pentingnya pengawasan dan fasilitas pengaman di sekitar sungai. "Kami akan minta OPD untuk perketat pengawasan dan mungkin diberi pembatas," jelasnya.

Beri Dukungan Psikis

Mimik menambahkan, orang tua juga diminta pro-

aktif memantau aktivitas anak-anaknya. Banyak anak kecil cenderung tertarik untuk masuk sungai. Perilaku mereka memerlukan perhatian ekstra dari orang tua maupun lingkungan sekitar.

Dalam kesempatan itu, Mimik juga memberikan dukungan psikis dan juga materil kepada kedua orang tua korban. "Ini jadi pelajaran bersama. Selain orang tua juga pemerintah," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DLHK Ambil Alih Pengelolaan TPS3R Terungkulon

Data Tak Valid dan Retribusi Macet

SIDOARJO - Dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) mengambil alih pengelolaan TPS3R Desa Terungkulon, Krian. Upaya tersebut dilakukan karena DLHK menemukan adanya pengelolaan bermasalah dan menunggak retribusi Rp 26 juta.

Kepala TPA Griyo Mulyo Hajid Arif Hidayat mengungkapkan, masyarakat sebenarnya sudah membayar iuran antara Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per bulan. Tapi, iuran tersebut tidak disetor ke pemerintah. "Pengelolaannya tidak berjalan baik," kata Hajid.

Dia menjelaskan, persoalan utama berasal dari vakumnya kelembagaan pengelola sampah di tingkat desa. Selama ini tidak ada kelompok swadaya masyarakat (KSM) maupun BUMDes yang secara resmi mengoordinasikan operasional TPS3R. Masalah diperparah dengan data layanan yang tidak valid. DLHK menugaskan petugas khusus untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh.

Pj Kepala Desa Terungkulon Randi Wisnu Kusuma bersyukur pengelolaan sampah di desanya mendapatkan perhatian. "Kami akan dikawal pembuatan KSM-nya agar pengelolaan sampah lebih baik," kata Randi. (ful/hen)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BELUM TERTATA: DLHK bakal menugaskan petugas khusus untuk memperbaiki sistem pengelolaan TPS3R Desa Terungkulon, Krian.

Jawa Pos



BPPD SIDOARJO

TERJUN LANGSUNG: Pelayanan BPPD Sidoarjo terhadap masyarakat yang membayar pajak.

■ Bayar Pajak Sambil Olahraga

BPPD Hadirkan Layanan PBB hingga Samsat Keliling

WARGA kini bisa membayar pajak tanpa harus mengorbankan waktu kerja. Cukup datang ke Car Free Day (CFD) Alun-alun Sidoarjo setiap Minggu pagi, berbagai layanan pajak sudah tersedia dalam satu lokasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) menghadirkan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kawasan CFD.

Tak hanya itu, layanan juga diperluas melalui kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, yang menghadirkan mobil Samsat Keliling untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Noer Rachmawati, mengatakan bahwa layanan ini sengaja dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. "Layanan pembayaran pajak daerah sengaja kami hadirkan saat CFD Sidoarjo

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPPD Hadirkan Layanan...

untuk memudahkan masyarakat. Alhamdulillah banyak yang memanfaatkannya," ujar Noer saat dikonfirmasi, Senin (13/4).

Menurutnya, kehadiran layanan di CFD menjadi solusi bagi masyarakat

yang selama ini terkendala waktu saat hari kerja. Dengan konsep jemput bola, masyarakat bisa tetap produktif sekaligus memenuhi kewajiban pajaknya.

"Kalau di hari biasa mungkin masyarakat terkendala kerja. Tapi di sini, sambil olahraga atau jalan-jalan,

mereka bisa sekaligus membayar pajak," jelasnya.

Noer Rachmawati menegaskan, seluruh layanan pembayaran pajak daerah difasilitasi dalam kegiatan tersebut dan akan terus dihadirkan setiap pelaksanaan CFD.

"Setiap Car Free Day kami buka

layanan di Paseban Alun-alun, mulai pukul 05.30 sampai 09.00, mengikuti waktu pelaksanaan CFD," tambahnya.

Ia berharap inovasi layanan jemput bola ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. (dik/vga)



Sering Melanggar, Satpol PP Tertibkan PKL di Jalan Majapahit

KOTA-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan patroli dan cipta kondisi guna menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kegiatan yang dimulai sejak pagi tersebut melibatkan kekuatan 19 personel. Patroli menyasar sejumlah titik strategis di wilayah kota, di antaranya Alun-alun Sidoarjo, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Raya Candi, kawasan Gading Fajar, Taman

Pinang Indah, Jalan Raya Ponti, Jalan Pahlawan, hingga Jalan Raya Jati.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melaksanakan penjagaan di kawasan Alun-alun Sidoarjo dan Taman Pinang Indah guna mengantisipasi potensi gangguan ketertiban.

Selain itu, Satpol PP juga memberikan imbauan kepada para pedagang kaki lima (PKL) agar tidak menggunakan trotoar maupun sempadan jalan untuk

● Ke Halaman 10



IST

Sering Melanggar...

berjualan, khususnya di wilayah Jalan Raya Jati, Jalan Majapahit, Gading Pajar, dan Taman Pinang.

Petugas juga melakukan penertiban terhadap empat PKL yang kedapatan berjualan di bahu jalan di kawasan Ja-

lan Majapahit, tepatnya di depan RSUD Notopuro. Para pelanggar tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Satpol PP Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Kasi Opsdal) Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno mengatakan ba-

hwa kegiatan patroli rutin ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

"Kami terus mengintensifkan patroli dan cipta kondisi di wilayah Sidoarjo, khususnya di titik-titik yang rawan pelanggaran. Kami juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui im-

bauan kepada para PKL agar mematuhi aturan yang berlaku," ujarnya.

Novianto Koesno menambahkan, penertiban dilakukan sebagai langkah terakhir apabila imbauan tidak diindahkan.

"Kami berharap para pedagang dapat lebih tertib dan tidak menggunakan

fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan untuk berjualan, demi kepentingan bersama," tambahnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Sementara itu, laporan layanan darurat 112 pada hari tersebut tercatat nihil.

Satpol PP Sidoarjo memastikan kegiatan patroli dan cipta kondisi akan terus dilakukan secara rutin guna menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib bagi masyarakat. (sur/vga)

Langgar Izin Tinggal...

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Operasi Wirawaspada 2026 dilak-

sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, pemberi layanan, maupun sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan negara.

Agus Winarto menegaskan komit-

Kantor Imigrasi Surabaya.

"Kami akan terus melakukan pengawasan secara rutin dan mandiri, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait melalui Tim Pengawasan

wasan. Warga diminta segera melapor ke kantor imigrasi terdekat jika menemukan WNA yang diduga melanggar aturan atau menunjukkan aktivitas mencurigakan.



BERDUKA: Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, saat mengunjungi rumah balita yang meninggal tenggelam di Sungai Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin.

Pengawasan Bantaran Sungai Harus Diperketat

- Wabup Soroti Keselamatan Anak
- Takziah ke Rumah Balita yang Tenggelam

TANGGULANGIN- Tragedi tenggelamnya balita di bantaran sungai kembali menjadi peringatan keras bagi masyarakat dan pemerintah. Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan pentingnya pengawasan ketat di kawasan permukiman dekat sungai, terutama untuk melindungi anak-anak yang sangat rentan terhadap bahaya.

Hal tersebut disampaikan saat ia melayat ke rumah duka Gibran Septian, balita 1,5 tahun asal Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, yang menjadi korban terseret arus sungai.

Menurut Mimik, Pemkab Sidoarjo akan berkoordinasi dengan berbagai pihak

guna memperketat pengawasan di wilayah-wilayah rawan, khususnya permukiman di bantaran sungai.

"Ke depan, pemukiman di pinggir sungai harus lebih diperhatikan.

Perlu pengawasan ketat, terutama untuk anak-anak.

Jangan sampai lengah, apalagi anak usia di bawah dua tahun sangat rentan,"

tegas Mak Mimik sapaan akrabnya, Senin (13/4).

Ia menjelaskan, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap air, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari orang tua maupun lingkungan sekitar.

"Air itu menarik bagi anak-anak. Bahkan orang dewasa saja kadang



Pengawasan Bantaran Sungai...

tertarik. Apalagi anak kecil yang belum tahu bahaya, ini yang harus diantisipasi bersama," tambahnya. Kehadiran Mimik di rumah duka juga untuk menyampaikan belasan-

kawa secara langsung kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. "Saya turut berduka cita yang mendalam atas kejadian ini. Semoga keluarga diberi ketabahan dan kekuatan," ucapnya. Dalam kunjungan tersebut, ia di-

dampingi Kepala BPBD Sidoarjo Sabino Mariano dan Camat Tanggulangin Arie Prabowo. Mimik menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan mengajak masyarakat untuk tetap ikhlas menghadapi cobaan.

"Kondisi anak sudah ditemukan utuh, dan keluarga sudah menerima ini sebagai ujian dari Allah SWT. Kita harus ikhlas menghadapi musibah seperti ini," tuturnya. Sebagai informasi, Gibran Sep-tian sebelumnya dilaporkan hi-

lang dan diduga terjatuh ke sungai. Setelah lima hari pencarian intensif oleh tim gabungan, korban akhirnya ditemukan pada Minggu (12/4) sekitar pukul 11.20, sejauh kurang lebih 13 kilometer dari lokasi awal. (dik/vga)



Perajin Tahu dan Tempe Keluhkan Naiknya Harga Kedelai Impor

KOTA-Usai momen Lebaran, para perajin tahu dan tempe di Sidoarjo dihadapkan pada tekanan baru. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama kembali merangkak naik, memicu kekhawatiran terhadap kelangsungan usaha mereka.

Kenaikan harga tersebut terbilang tidak besar, namun cukup berdampak. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp 10.400 hingga Rp 10.500 per kilogram, kini harga kedelai impor menembus Rp 10.600 per kilogram.

Di Desa Sepande, Kecamatan Candi, lonjakan harga ini langsung dirasakan para pelaku usaha rumahan. Biaya produksi meningkat, sementara ruang untuk menaikkan harga jual sangat terbatas.



BAHAN BAKU: Kuli panggul mengangkat kedelai impor di Sidoarjo.

Salah satu agen kedelai impor, Muhammad Fardani, mengungkapkan bahwa kenaikan harga sudah mulai terjadi sejak menjelang Idulfitri dan berlanjut hingga setelah Lebaran.

"Harga kedelai impor

kualitas bagus, saat ini saya jual di harga Rp 10.600 per kilogram. Sebelumnya di kisaran Rp 10.400 hingga Rp 10.500," ujar Fardani saat dikonfirmasi, Senin (13/4).

Menurutnya, kenaikan

tersebut langsung dikeluarkan para pelanggan, yang mayoritas merupakan perajin tahu dan tempe. Mereka harus memutar strategi agar tetap bisa memproduksi di tengah biaya bahan baku yang

terus meningkat.

"Kondisi ini tentu di- keluhkan para pembeli, karena berdampak langsung ke biaya produksi mereka," tambahnya.

Tak hanya soal harga, kendala juga muncul dari sisi distribusi. Fardani menyebut pasokan kedelai sempat mengalami keterlambatan hingga dua hari dari jadwal pengiriman rutin. "Saya biasanya dika- bari kalau pasokan telat. Kemarin sempat mundur dua hari," jelasnya.

Untuk menyasati kon- disisi tersebut, ia menyedi- akan berbagai merek ke- delai impor dengan va- riasi harga dan kualitas. Langkah ini dilakukan agar pelanggan tetap bisa memperoleh stok meski harus menyesuaikan pilihan. (dik/vga)



Pasar Tradisional di Sidoarjo Sepi Pengunjung, Pembeli Pilih Belanja di Pasar Tumpah

Keberadaan pasar desa yang ada di kabupaten Sidoarjo, lebih menarik bagi pedagang yang selama ini berjualan di dalam pasar-pasar tradisional di Sidoarjo.

Ali Kusyanto, Sidoarjo

Mereka akhirnya pindah tempat-jualan, dari pasar-tradisional ke pasar desa, karena dianggap lebih ramai pembeli.

Sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo terlihat memprihatinkan karena sepi pembeli. Contohnya di pasar tradisional Wonoayu, Pasar tradisional Buduran dan Pasar tradisional Waru.

Di pasar Wonoayu meski sarana infrastruktur sudah dibangun, pembeli yang datang untuk berbelanja tetap saja sepi.

Pembeli lebih memilih berbelanja di pasar dadakan/pasar desa

yang ada di wilayah Perumahan TAS 3. Lokasinya berada sekitar 1 kilometer di sebelah timur pasar tradisional Wonoayu itu.

Pada hari libur seperti Hari Minggu di pasar ini pembelinya membludak. Pedagang berjualan di pinggir jalan aspal menuju Perumahan TAS 3 tersebut.

Terpantau ada sekelompok orang yang memungut retribusi kepada para pedagang yang berjualan. Kurang jelas mereka dari pihak desa atau kelompok mana.

Pembelinya, selain warga Perumtas 3 juga warga-warga desa yang berada di sekitar Perumtas 3 itu. Termasuk juga ada dari warga desa yang dekat dengan pasar



Pasar Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, setiap hari ramai penjual dan pembeli.

tradisional Wonoayu itu.

Contoh lain juga di Pasar Buduran. Nasibnya juga demikian. Pasar tradisional sejak jaman Belanda ini, meski sarananya juga diperbaiki, pembeli setiap harinya sepi. Ada yang menyebut keberadaan pasar ini seperti hidup enggan mati tidak mau.

Tetapi ironisnya, di sebelah barat pasar Buduran itu, ada pasar dadakan atau pasar desa yang ramai setiap harinya. Mulai habis Subuh sampai sekitar pukul 8 pagi. Lokasinya di Desa Sidokerto Kecamatan Buduran.

Pedagang berjualan di pinggir-pinggir jalan beraspal. Pengguna jalan yang lewat, yakni

» ke halaman 11

HARIAN
Bhirawa

Pasar Tradisional di Sidoarjo Sepi Pengunjung, Pembeli Pilih Belanja di Pasar Tumpah

● Sambungan hal 1

pengendara roda 2 dan roda 4, harus pelan-pelan dan sabar.

Akibatnya terjadi kemacetan merambat dan panjang di lokasi jalan kabupaten yang menghubungkan sejumlah desa di wilayah Kecamatan Buduran itu. Warga yang berbelanja, selain warga desa setempat juga warga desa lain dan warga perumahan di sekitar lokasi pasar desa.

Pasar tradisional sepi, juga terjadi di Pasar tradisional Kecamatan Waru yang berada di Desa Kedungrejo. Para pembeli lebih memilih berbelanja di pasar dadakan/pasar desa atau pasar tumpah di timur fly over Waru.

Transaksi di pasar dadakan ini, bi-

asanya ramai sebelum subuh sampai pagi hari. Tetapi dampaknya, jalan raya di tempat itu yang ramai dengan berbagai jenis kendaraan, setiap hari macet.

"Stand-stand di pasar tradisional Waru yang ada di Desa Kedungrejo itu sepi, tidak banyak pedagang yang berjualan," komentar salah satu pengurus himpunan pedagang pasar (HPP) Kabupaten Sidoarjo, Sugito, belum lama ini.

Pasar tradisional Waru di tempat itu, juga kalah ramai dengan pasar dadakan/pasar desa di Desa Kureksari Kecamatan Waru. Yang lokasinya selatan di pasar tradisional Waru tersebut.

Pembeli selain dari warga desa setempat, juga warga dari desa sekitar dan warga dari perumahan Delta Sari, yang

dekat dengan lokasi pasar dadakan.

Lebih ramai lagi, di selatan desa Kureksari Kecamatan Waru itu, juga ada pasar dadakan/desa Sawotratap Kecamatan Gedangan.

Di pasar desa Sawotratap ini, berada di pinggir desa. Pedagang berjualan di kanan-kiri jalan desa. Sepanjang kurang lebih 200 meter di tempat itu ramai dengan transaksi jual beli. Roda 2 tidak bisa lewat. Apalagi roda 4.

Yang memungut retribusi di pasar ini adalah petugas RT setempat. Setiap pedagang dipungut Rp3.000. Belum lagi uang parkir kendaraan dari pembeli yang membawa sepeda dan motor.

Karena ada pasar desa, RT Sawotratap ini merupakan RT yang banyak pemasu-

kannya dibanding RT-RT lain, yang ada di Desa Sawotratap.

Perlu diketahui, pedagangnya tidak hanya berasal dari desa setempat. Tetapi juga dari desa-desa lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Pedagang mencari peruntungan di pasar desa ini, karena Desa Sawotratap adalah desa yang padat penduduk, dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Gedangan.

Belum lagi, juga ada pasar dadakan/pasar desa, yang ada di Desa Wage Kecamatan Taman. Aktivitas transaksi jual beli pada pagi hari sangat ramai.

Pengguna roda dan roda 4 harus pelan dan sabar saat melewati lokasi pasar desa tersebut. Pasar dadakan ini ada mulai pagi, siang hingga malam hari.

Kepala Bidang Pasar dari Dinas Perindustrian Perdagangan Sidoarjo, Handoko, mengatakan beberapa waktu ini hasil retribusi dari pedagang pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sidoarjo menurun.

Pedagang banyak yang pindah berjualan di pasar-pasar desa. Karena pembeli merasa lokasinya dekat dengan penjual.

"Ini salah satu faktor, yang ikut mempengaruhi retribusi pasar tradisional menurun. Juga karena banyak retail-retail besar dan penjualan penjualan secara online saat ini," komentarnya.

Pihaknya akan mencari sebuah solusi, dengan kerja sama Pemerintah desa. Agar Retribusi pedagang di pasar desa dapat dimanfaatkan untuk keperluan kabupaten juga keperluan desa. [kus.gat]

HARIAN
Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Beri BPJS dan Kursi Roda untuk Warga Taman

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Mulai dari jaminan BPJS Kesehatan hingga pemberian bantuan, seperti kursi roda bagi warga yang membutuhkan.

Sejumlah warga dari Kecamatan Taman pun menjadi penerima manfaat dalam program ini. Di antaranya Muhammad Rahma, warga Desa Geluran dan Evan Nafis di Desa Kalijaten.

Pemkab Sidoarjo memberikan keanggotaan BPJS Kesehatan kepada warga penerima bantuan. Kartu tersebut dapat digunakan untuk seluruh anggota



Bupati Sidoarjo Subandi saat menyerahkan bantuan kesehatan kepada warga Kecamatan Taman.

keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK), sehingga akses layanan kesehatan menjadi lebih mudah.

“Mudah-mudahan fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya jika ada anggota keluarga yang sakit, baik untuk berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, maupun rujukan ke rumah sakit,” ujar Subandi, Senin (13/4/2026).

Selain jaminan kesehatan, bantuan

kursi roda juga diberikan kepada warga yang membutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. “Semoga bantuan kursi roda ini dapat memfasilitasi mobilitas sehari-hari dan bermanfaat untuk ke depannya,” ucapnya.

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga. Perbaikan difokuskan pada bagian rumah yang sudah tidak layak se-

perti atap dan tembok.

Beberapa rumah yang akan diperbaiki dalam waktu dekat di Kecamatan Taman antara lain kediaman Fatchul Huda dan Sutamto, warga Desa Geluran. “Kita akan segera melakukan renovasi rumah pada atap dan tembok yang membutuhkan perbaikan. Kita akan koordinasi dengan Baznas untuk segera melakukan perbaikan,” tukas Subandi. (md/rus)

HARIAN
BANGSA

Koran Minggu, Jember

PEMKAB SIDOARJO MAKSIMALKAN LAYANAN PUBLIK LEWAT CAR FREE DAY

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Car Free Day/CFD Sidoarjo kembali dilaksanakan, Minggu, (12/4). Antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan hari bebas kendaraan bermotor di Jalan A. Yani Sidoarjo terlihat cukup tinggi. Ratusan UMKM juga terlihat memenuhi Jalan A. Yani sisi Timur yang memang dikhususkan untuk berjualan.

Pelaksanaan kembali CFD setelah libur Ramadhan itu juga dimanfaatkan Pemkab Sidoarjo untuk memaksimalkan layanan publik. Seperti layanan pembayaran pajak daerah oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo/BPPD Sidoarjo serta konsultasi layanan perijinan berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPSTP Sidoarjo.

Selain itu Dinas Kesehatan Sidoarjo juga ikut memberikan layanan kesehatan gratis. Tiga Puskesmas diterjunkan untuk memberikan layanan gratis berupa cek gula darah serta tensi darah. Seperti yang dilakukan Puskesmas Gedangan, Puskesmas Wonokasian serta Puskesmas Ganting. Layanan kesehatan gratis tersebut juga diikuti oleh rumah sakit swasta seperti RSUD Citra Medika, RSUD Anwar Medika serta RSUD Rahman Rahim dan RSUD Bunda Sidoarjo. Layanan donor darah oleh unit donor darah PMI Sidoarjo juga turut hadir dalam setiap kesempatan CFD Sidoarjo.

Tidak ketinggalan Polresta Sidoarjo juga ikut menghadirkan layanan publik seperti perpanjangan SIM A dan C, serta pembuatan SKCK. Layanan Samsat keliling Jawa Timur juga



hadir pada CFD Sidoarjo pagi tadi. Layanan Perpustakaan keliling juga hadir untuk memanjakan pengunjung CFD.

Kepala BPPD Sidoarjo Noer Rachmawati yang hadir dalam CFD Sidoarjo menga-

takan layanan pembayaran pajak daerah sengaja dihadirkan pada pelaksanaan CFD Sidoarjo. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Bahkan BPPD Sidoarjo juga bekerja

sama dengan Badan Pendapatan Daerah/Bapenda Jatim untuk menghadirkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Layanan tersebut dapat diperoleh melalui

mobil Samsat Keliling Jatim. "Alhamdulillah banyak yang memanfaatkannya karena mungkin kalau masyarakat ingin melakukan pembayaran pajak dihari biasa terkendala kerja, ucapnya. (Khol/Dy)

Bupati Sidoarjo Serahkan Santunan JKK untuk Keluarga Driver Ojol Korban Kecelakaan

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pojok Kiri, Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Ambar Hariyanto, seorang driver ojek online yang meninggal dunia akibat kecelakaan pekan lalu.

Itu merupakan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan santunan dilakukan di kediaman korban di Desa Pertapanmaduretno, Kecamatan Taman, Sabtu (11/4/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Camat Taman serta jajaran Forkopimka Kecamatan Taman

Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa santunan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan



kepada masyarakat pekerja, termasuk para pekerja sektor informal seperti ojek online.

"Hari ini kita menyerahkan santunan kepada keluarga saudara kita, driver ojek online yang mengalami kecelakaan. Ini merupakan bagian dari program pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan yang mem-

berikan perlindungan bagi

para pekerja," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa total santunan yang diberikan sebesar Rp70 juta untuk jaminan kematian, serta tambahan manfaat beasiswa pendidikan bagi anak korban sebesar Rp79,5 juta.

"Alhamdulillah, santunan sudah diterima dan masuk ke rekening keluarga. Kami berharap bantuan ini dapat

dimanfaatkan, khususnya untuk keberlanjutan pendidikan anak korban," lanjutnya.

Subandi menegaskan bahwa pendidikan anak korban menjadi perhatian utama pemerintah. Ia berharap anak tersebut dapat terus melanjutkan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi.

"Yang terpenting, anak ini harus tetap sekolah. Pemerin-

tah akan terus mengawal agar pendidikannya tidak terhenti. Harapannya, ke depan bisa meraih masa depan yang lebih baik dan membantu keluarga," tegasnya.

Rina, istri korban merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masih peduli dengan keluarganya, ucapnya. (Khol/Dy)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Empat Posisi di BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo "Terlarang" untuk Pengurus Parpol

14 Apr 2026 06:52



Fathur Roziq
Editor

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman pendaftaran	11 April 2026
2.	Pendaftaran dan penerimaan <i>hardcopy/softcopy</i> dokumen persyaratan	13-17 April 2026
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	21 April 2026
4.	Tes Ujian Pra-Kompetensi	23 April 2026
5.	Pengumuman peserta yang lolos ke tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	27 April 2026
6.	Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	
	- Tes tulis	28 April 2026
	- Psikotes	28 April 2026
	- Pengumpulan makalah	28 April 2026
	- Presentasi makalah	30 April 2026
	- Wawancara dengan Panitia Seleksi	30 April 2026
7.	Pengumuman peserta yang lolos ke tahap wawancara akhir	05 Mei 2026
8.	Wawancara Akhir	06-08 Mei 2026
9.	Pengumuman Akhir	11 Mei 2026

Jadwal pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman empat calon komisaris dan direksi di PT BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Pendaftaran calon-calon direktur, direksi, maupun komisaris perusahaan perseroan daerah (perseroda) sudah mulai. Selain syarat-syarat umum, seperti usia, pendidikan, keahlian, dan lain-lain, pendaftar calon pengelola perseroda tidak boleh berasal dari partai politik, anggota legislatif, dan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Rawan konflik kepentingan.

Pendaftaran dibuka pada 13 hingga 17 April 2026. Ada empat posisi yang akan diisi lewat seleksi Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi PT BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo Tahun 2026. Masing-masing adalah calon Komisaris PT BPR Delta Artha Perseroda dari Unsur Pemerintah Daerah. Calon Komisaris Independen PT BPR Delta Artha Perseroda.

Selain itu, calon Direktur Operasional dan Bisnis PT BPR Delta Artha Perseroda. Satu-satunya posisi di PT Aneka Usaha Sidoarjo Perseroda adalah calon direktur. Saat ini, posisi direktur PT Aneka Usaha diduduki oleh pejabat sementara (Pjs).

Di setiap pengumuman ketentuan calon Komisaris dan Calon Anggota Direksi BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo, dicantumkan syarat bahwa pendaftar *tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.*

Setiap pendaftar juga diharuskan menandatangani surat pernyataan bermeterai Rp 10.000. Isinya berbunyi: *tidak sedang menduduki kepengurusan partai politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.*

Baca Juga:

Dicari! Direksi BPR Delta Artha dan Direktur PT Aneka Usaha Sidoarjo, Seperti Apa Seleksinya?

Selain itu, pendaftar tidak rangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau badan usaha swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan (nama BUMD)." Demikian bunyi salah satu butir pernyataan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Selain itu, pendaftar tidak rangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau badan usaha swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan (nama BUMD)." Demikian bunyi salah satu butir pernyataan.

"Semua persyaratan itu bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi *conflict of interest* saat yang bersangkutan menjabat komisaris atau direksi," jelas anggota Pansel Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi PT BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo Tahun 2026.

Persyaratan lain berlaku khusus untuk calon komisaris independen PT BPR Delta Artha. Calon komisaris dari unsur p pemerintah daerah ini harus memiliki status sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Sidoarjo. Minimal pangkat/golongan Pembina Tingkat I (IV/b). Ini setingkat eselon IIIa, yaitu sekelas camat, kepala bagian, sekretaris dinas.

Baca Juga:

[Bupati Subandi Larang Titip-titipan Calon Direksi BPR Delta Artha dan Direktur PT Aneka Usaha Sidoarjo](#)

Syarat lain bagi PNS untuk mendaftar ialah dia harus mendapatkan izin dari kepala daerah. Jadi, calon komisaris dari unsur pemerintah daerah di PT BPR Delta Artha juga harus mengantongi surat izin yang ditandatangani langsung oleh Bupati Sidoarjo.

"Karena, meski ini kompetisi, tetap ada namanya etika. Harus ada izin dari bupati bagi seorang PNS, seperti saat mengikuti *shelter* seleksi calon pejabat," tegas Bahrul Amig yang juga menjabat Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tersebut. (*)



DPRD Sidoarjo Ingatkan Komisaris–Direksi BPR Delta Artha dan Aneka Usaha

Gus Wawan: *Business Plan* Bagus Tak Cukup, Keuntungan Harus Nyata

14 Apr 2026 08:21



Fathur Roziq
Editor



Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan (Gus Wawan). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Proses seleksi calon-calon Komisaris dan Direksi PT BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo mendapatkan perhatian serius dari DPRD Sidoarjo. Komisaris dan direksi terpilih nanti harus mampu membuktikan hasil nyata dalam kinerjanya. *Business plan* bagus tidak cukup.

Sekretaris Komisi B (Bidang Keuangan dan Perekonomian) DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, pengisian jabatan komisaris dan direksi di PT BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha sangat penting saat ini. Sebab, semakin lengkap jajaran manajemennya, semakin bagus kinerja *team work*-nya.

Soal proses seleksi, anggota DPRD Sidoarjo yang karib disapa Gus Wawan itu menegaskan bahwa sudah ada aturan dan tahapan yang jelas. Proses seleksi wajib dilakukan secara profesional. Salah satu parameternya adalah latar belakang pendidikan calon.

"Harus diperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan calon-calon komisaris dan direksi itu," tambah Gus Wawan yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo tersebut.

Legislator DPRD Sidoarjo dari PKB itu menekankan, siapa pun komisaris dan direksi yang terpilih, dia harus mendapatkan target kinerja yang terukur. Ukurannya bukan sekadar angka-angka atau indeks kinerja. Harus spesifik kepada hasil yang benar-benar nyata.

Baca Juga:

Dicari! Direksi BPR Delta Artha dan Direktur PT Aneka Usaha Sidoarjo, Seperti Apa Seleksinya?





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kantor PT BPR Delta Artha Sidoarjo di Jalan A. Yani, Sidoarjo. Sahamnya 95 persen dimiliki Pemkab Sidoarjo. (Foto: website BPR Delta Artha)

Bagaimana mengukur hasil nyata itu? "Keuntungan yang nyata sesuai dengan penyertaan modal Pemkab Sidoarjo," tandas Gus Wawan yang anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo tersebut.

Anggota DPRD Sidoarjo asal Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, itu menjelaskan, kinerja komisaris dan direksi PT BPR Delta Artha, PT Aneka Usaha, maupun badan usaha milik daerah lainnya tidak cukup diukur dari (perencanaan dan proyeksi bisnis) *business plan*.

Yang jauh lebih penting ialah keuntungan yang riil bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Business plan* bagus, penyertaan modal tambah, tapi ternyata keuntungan tidak nyata. Itu yang dicermati DPRD Sidoarjo.

"Jangan sampai keuntungan tipis dengan alasan berbagai variable," tandasnya.

Baca Juga:

[Empat Posisi di BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo "Terlarang" untuk Pengurus Parpol](#)

Mulai 11 April hingga 11 Mei 2026 sedang berlangsung seleksi

calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi PT BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo. Pendaftaran resmi dibuka pada 13 hingga 17 April 2026.

Ada empat posisi yang akan diisi lewat seleksi. Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi PT BPR Delta Artha dan PT Aneka Usaha Sidoarjo Tahun 2026. Masing-masing adalah calon Komisaris PT BPR Delta Artha Perseroda dari Unsur Pemerintah Daerah. Calon Komisaris Independen PT BPR Delta Artha Perseroda.

mgid ▶



Selain itu, calon Direktur Operasional dan Bisnis PT BPR Delta Artha Perseroda. Satu-satunya posisi di PT Aneka Usaha Sidoarjo Perseroda adalah calon direktur. Saat ini, posisi direktur PT Aneka Usaha diduduki oleh pejabat sementara (Pjs). (*)

Yuk, baca berita ketik
lainnya di Google News!
Temukan Lowongan Kerja Teraktual



Kunjungi

Tags: [DPRD Sidoarjo](#) [BPR Delta Artha](#) [Calon Komisaris](#) [Calon Direksi](#)
[PT Aneka Usaha Sidoarjo](#) [PAD Sidoarjo](#)



Perumda Delta Tirta Sidoarjo Raih Penghargaan Bintang 5 TOP BUMD Awards 2026, Perkuat Tata Kelola dan Digitalisasi

April 13, 2026 - 95 Views



Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.M.T., di Jakarta pada Senin, 13 April 2026.

Progresjatim.com, SIDOARJO – Perumda Delta Tirta Sidoarjo menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan bintang 5 dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 secara berturut-turut dalam dua tahun terakhir.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.M.T., di Jakarta pada Senin, 13 April 2026. Penghargaan yang didapat adalah sebagai TOP perusahaan BUMD 2026, sebagai TOP Direktur Utama BUMD 2026, dan untuk Bupati Sidoarjo H. Subandi, S. H., M. Kn sebagai TOP Pembina BUMD 2026.

Dwi menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan mendorong transformasi digital sebagai fondasi utama peningkatan kinerja bisnis dan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat.

“Fokus kami adalah bagaimana tata kelola dan digitalisasi menjadi kunci dalam membangun kinerja bisnis sekaligus meningkatkan layanan Perumda Delta Tirta Sidoarjo,” ujarnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Soeryadi, M.M.T., di Jakarta pada Senin, 13 April 2026.



Progresjatim.com, SIDOARJO – Perumda Delta Tirta Sidoarjo menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan bintang 5 dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 secara berturut-turut dalam dua tahun terakhir.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.M.T., di Jakarta pada Senin, 13 April 2026. Penghargaan yang didapat adalah sebagai TOP perusahaan BUMD 2026, sebagai TOP Direktur Utama BUMD 2026, dan untuk Bupati Sidoarjo H. Subandi, S. H., M. Kn sebagai TOP Pembina BUMD 2026.

Dwi menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan mendorong transformasi digital sebagai fondasi utama peningkatan kinerja bisnis dan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat.

“Fokus kami adalah bagaimana tata kelola dan digitalisasi menjadi kunci dalam membangun kinerja bisnis sekaligus meningkatkan layanan Perumda Delta Tirta Sidoarjo,” ujarnya.

Dia menambahkan, penghargaan ini sekaligus melanjutkan capaian perusahaan yang sebelumnya juga berhasil meraih Bintang 5 pada TOP BUMD Awards 2025.

Kinerja dan Tantangan

Berdasarkan hasil audit BPKP Tahun 2024, Perumda Delta Tirta mencatat skor kinerja sebesar 3,18. Hingga saat ini, audit untuk tahun buku 2025 masih dalam proses.

Dari sisi operasional, jumlah pelanggan tercatat sebanyak 186.349 sambungan, dengan cakupan layanan air minum mencapai 35,09 persen. Namun, tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) masih berada di angka 34,06 persen.

“Cakupan layanan kami masih 35 persen, dan NRW saat ini masih 34 persen. Ini menjadi tantangan utama yang terus kami benahi,” jelasnya.

Meski demikian, kualitas layanan air minum tetap terjaga dengan distribusi yang berjalan selama 24 jam kepada pelanggan.

Percepatan Digitalisasi

Sebagai bagian dari solusi, Perumda Delta Tirta terus mendorong implementasi digitalisasi secara konsisten. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pilot project penerapan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan tingkat kehilangan air.

Selain itu, perusahaan juga mengembangkan Digital Asset Management System (DMAS) dan melakukan integrasi dengan teknologi Enterprise Resource Planning (ERP) yang telah diterapkan sejak 2021. Sistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemasangan sambungan baru, keuangan, SDM, hingga pengadaan dan monitoring evaluasi.

“Seluruh proses internal perusahaan saat ini sudah terintegrasi. Ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi,” tambah Dwi Hary.

Menariknya, pengembangan sistem teknologi informasi tersebut merupakan hasil karya internal tim Perumda Delta Tirta, yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kemandirian digital.

Komitmen Layanan Berkelanjutan

Ke depan, Perumda Delta Tirta menargetkan peningkatan cakupan layanan serta penurunan NRW secara signifikan melalui optimalisasi teknologi dan pembangunan infrastruktur, termasuk rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru.

Dengan penguatan tata kelola dan digitalisasi, perusahaan optimistis dapat menghadirkan layanan air bersih yang lebih luas, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sidoarjo. (*)

Post Views: 95

by Progress01



**DPRD Sidoarjo Desak Penindakan Tegas Kendaraan ODOL,
Demi Keselamatan dan Jalan Tetap Layak**Neo Zeera 2 Min Baca
10 April 2026 - 14:30 WIB

SeputarDesa.com, Sidoarjo – DPRD Sidoarjo mendesak penindakan tegas terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang masih melintas di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kualitas infrastruktur dari kerusakan akibat beban berlebih.

Desakan itu disampaikan saat Operasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang dan Penumpang Tahun 2026 yang digelar di Jalan Raya Siring, Kecamatan Porong, Jumat (10/4/2026).

Operasi gabungan tersebut melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, dan Jasa Raharja Sidoarjo, serta dihadiri anggota DPRD Sidoarjo, Vike Widya Asrori dan Muh Zakaria Dimas Pratama.

Baca Juga : [Launching Konservasi Hutan di Prigen, Peltu Rudi Ajak Warga Peduli Lingkungan](#)

Dalam kegiatan itu, petugas memeriksa kendaraan angkutan barang dan penumpang secara menyeluruh, mulai dari kelengkapan surat-surat, kondisi teknis kendaraan, hingga muatan yang dibawa.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama, menegaskan bahwa kendaraan ODOL menjadi ancaman serius karena tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi memicu kecelakaan serta mempercepat kerusakan jalan.

"Kendaraan ODOL ini membahayakan keselamatan masyarakat dan merusak jalan yang dibangun menggunakan anggaran negara. Karena itu, penindakannya harus tegas dan konsisten," ujarnya.

Ia menjelaskan, kerusakan jalan yang disebabkan kendaraan bermuatan berlebih selama ini berdampak langsung pada masyarakat, baik dari sisi kenyamanan berkendara maupun keselamatan.

Baca Juga : [Teka-teki Kematian Serda Rafael: Cahaya Kalimantan yang Tiba-tiba Padam di Malam Misterius](#)

Selain itu, pemerintah daerah juga harus menanggung biaya besar untuk perbaikan jalan yang rusak secara berulang.

"Kalau jalan cepat rusak akibat ODOL, masyarakat yang dirugikan. Risiko kecelakaan meningkat dan anggaran publik kembali terserap untuk perbaikan," katanya.

Melalui operasi tersebut, DPRD Sidoarjo juga mendorong pengawasan lintas instansi agar penertiban kendaraan ODOL tidak hanya bersifat insidental, tetapi dilakukan secara berkelanjutan.

Selain penindakan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada pengemudi dan pelaku usaha transportasi agar mematuhi batas muatan dan memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.

"Keselamatan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur harus berjalan beriringan. Ini bentuk nyata keberpihakan kepada kepentingan rakyat," pungkas Dimas.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi